



## Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan: Membaca Pandangan Bakri Syahid Tentang Nasionalisme Dalam Tafsir Al-Huda

Izatul Muhidah Maulidiyah<sup>1</sup>, Hikmawati Sultani<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1</sup>, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[izamaulidiyah23@gmail.com](mailto:izamaulidiyah23@gmail.com), <sup>2</sup>[hikmawatisultani@iaingorontalo.ac.id](mailto:hikmawatisultani@iaingorontalo.ac.id)

### Abstract

This article examines the dynamics of Quranic interpretation and power in Indonesia, focusing on the Tafsir Al-Huda by Bakri Syahid. In Surah At-Taubah, verse 122, there is a command and ruling about seeking knowledge, as well as a command for jihad. Bakri Syahid, in his Tafsir Al-Huda Basa Jawi, contextualizes this with an attitude of nationalism. The tafsir produced by Bakri Syahid is undoubtedly influenced by both internal and external factors, particularly his role in the state governance and political system of his time. This article uses Surah At-Taubah, verse 122 as a starting point and examines the nationalism included by Bakri Syahid. Based on data obtained from literature reviews, this article argues that Bakri Syahid attempts to contextualize previous tafsir works he used as references to the Indonesian governmental ecosystem. He strengthens his efforts at contextualization by incorporating general works related to governance, military leadership, and Javanese social culture. This situation reflects Bakri's relatively close position to the government (New Order regime). This study concludes that Surah At-Taubah: 122, which has been understood by some mufassir (qur'anic commentators) as a verse containing the command to seek religious knowledge and jihad, aligns with Bakri Syahid's understanding. However, there is an effort by Bakri Syahid to contextualize the verse's meaning with the situation in Indonesia. This form of contextualization can be seen in Bakri's interpretation, which explains the necessity of nation-building. Such efforts can be realized by establishing government departments according to societal needs as an expression of nationalism, which becomes a landmark of his quranic exegesis work.

**Keywords:** Nasionalisme; Qs. At-taubah: 122; Tafsir Al-Huda; Bakri Syahid.

Artikel ini mengkaji tentang dinamika tafsir Al-Qur'an dan kekuasaan di Indonesia dengan mengambil fokus kajian pada Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid. Di dalam Qs. At-Taubah ayat 122 terdapat perintah dan hukum mencari ilmu, selain itu di dalamnya juga terdapat perintah jihad. Bakri Syahid dalam Tafsir Al-Huda Basa Jawi mengkontekstualisasikan dengan sikap nasionalisme. Produk tafsir yang dihasilkan oleh Bakri Syahid tentunya tidak lepas dari faktor internal maupun eksternal dirinya yang memiliki peran dalam tata negara dan sistem pemerintahan pada masanya. Artikel ini menggunakan pijakan awal Qs. At-taubah ayat 122 dan mengkaji sikap nasionalisme yang disertakan Bakri Syahid. Berdasarkan data yang diperoleh dari kajian pustaka, artikel ini berargumen bahwa Bakri Syahid mencoba mengkontekstualisasikan produk-produk tafsir sebelumnya yang digunakannya sebagai rujukan ke ekosistem pemerintahan Indonesia. Upaya kontekstualisasi dari karya tafsir sebelumnya ia kuatkan dengan karya-karya umum yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan, keperwiraan, dan sosial budaya Jawa. Keadaan demikian mencerminkan posisi Bakri yang relatif dekat dengan pemerintahan (rezim Orde Baru). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qs. At-Taubah :122 yang selama ini dipahami oleh sebagian kalangan mufassir sebagai ayat yang mengandung makna perintah menuntut ilmu agama serta jihad selaras dengan apa yang dipahami Bakri Syahid. Namun terdapat upaya Bakri Syahid untuk mengkontekstualisasikan makna ayat dengan keadaan di Indonesia. Bentuk kontekstualisasi tersebut dapat dilihat pada pemaknaan Bakri yang menjelaskan perlunya pembangunan negara. Hal demikian itu mampu dilakukan jika dibentuknya departemen-departemen negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai wujud dari sikap nasionalisme dan menjadi bagian *landmark* dari karya tafsirnya.

**Kata Kunci:** Nasionalisme; Qs. At-taubah ayat 122; Tafsir Al-Huda; Bakri Syahid.

**Article History:** Received: 16-03-2024 | Revised: 08-05-2024, 03-06-2024 | Accepted: 07-06-2024



## PENDAHULUAN

Makna dari Qs. At-Taubah ayat 122 yang selama ini berfokus seputar kewajiban mencari ilmu, memperdalam ilmu agama,<sup>1</sup> dan jihad,<sup>2</sup> mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut terdapat pada Tafsir Al-Huda, karya Bakri Syahid. Ia mengembangkan pemaknaannya terhadap konteks ke-Indonesia-an, ketika dia menulis Tafsir Al-Huda. Kitab tersebut ditulis pada masa rezim Orde Baru, dan Bakri menjadi bagian dalam pemerintahan. Keadaan demikian secara tidak langsung menarik makna ayat terhadap politik sosial pada pemerintahan saat itu. Johanna Pink menyebut upaya yang dilakukan Bakri Syahid sebagai bentuk kontrol agama terhadap institusi kenegaraan.<sup>3</sup> Upaya yang dilakukannya tidak luput dari peran yang disandangnya, latar belakang dan sosial-politik maupun keagamaan pada masa itu. Indal Abror dalam “kronologis tafsir Indonesia” menyebut bahwa sedikit dari karya tafsir pada masa orde baru yang mencoba untuk menarik makna penafsirannya pada konteks Indonesia.<sup>4</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya berusaha mengungkap aspek lokalitas Tafsir Al-Huda. Sebagian darinya menyebut bahwa Tafsir al-Hudā dengan bahasa Jawa krama cenderung memiliki nuansa tutur Bahasa halus. Tutur bahasa tersebut dengan kental menunjukkan keadaan budaya Jawa.<sup>5</sup> Melalui istilah *tepo seliro*, Mubasirun mencoba membandingkan dengan produk tafsir semasanya, *Tafsir al-Ibriz* menyebut bahwa Bakri lebih banyak terpengaruh akan konteks masa penulisan kitab tafsir.<sup>6</sup> Kemunculannya pada masa Orde Baru dengan posisi *mufasir* yang dekat dengan kekuasaan menjadi pemicu Tafsir al-Hudā bersifat apresiatif terhadap kebijakan Orde Baru.<sup>7</sup> Bahkan tafsir yang disertakan tersusun atas komponen konsep pemerintahan yang meliputi; konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.<sup>8</sup> Selaras dengan penelitian sebelumnya, Irham Maulana mengkaji konsep nasionalisme perspektif Bakri Syahid<sup>9</sup> melalui ayat-ayat al-Qur’an,<sup>10</sup> namun tanpa menyertakan Qs. At-Taubah: 122.

Artikel ini akan mengkaji lebih dalam mengenai sikap nasionalisme<sup>11</sup> yang sebagian darinya

<sup>1</sup> Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016); 84.

<sup>2</sup> Himy Bakar Almascaty, Panduan Jihad Untuk Aktivistis Gerakan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2001); 36.

<sup>3</sup> Johanna Pink, “Introduction,” in Qur’an Translation in Indonesia Scriptural Politics in a Multilingual State (New York: Routledge, 2023); 7.

<sup>4</sup> (Indal Abror; 2002)

<sup>5</sup> Neny Muthiatul Awwaliyyah, “Studi Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Huda, Tafsir Qur’an Basa Jawa Karya Jend. Purn. Drs. H. Bakri Syahid Al-Yogjawy,” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 1 (2021): 119–39, <https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.231>.

<sup>6</sup> Mubasirun, “Values of Tepo Seliro in Bakri Syahid’s Tafsir Al-Hudā and Bisri Mustofa’s Tafsir Al-Ibriz,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021): 351–76.

<sup>7</sup> Nurul Huda Maarif, “Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid Dalam ‘Al-Huda: Tafsir Qur’an Basa Jawi,’” *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 2 (2021): 69–91, <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.64>.

<sup>8</sup> Thoriq Fadli Zaelani, “Konsep Pemerintahan Bakri Syahid Dalam Tafsir Al-Huda Tafsir Qur’an Basa Jawi,” *Living Islam*, 2022.

<sup>9</sup> Irham Maulana Muhammad, “NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF BAKRI SYAHID (KAJIAN AYAT-AYAT NASIONALISME DALAM AL-HUDA TAFSIR QUR’AN BASA JAWI)” (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2020).

<sup>10</sup> Cinta tanah air (QS. Al-Baqarah ayat 126 dan QS. al-Baqarah ayat 144), pluralisme (QS. Al-Hujurat ayat 13), persamaan keturunan (QS. Al-A’raf ayat 160 dan QS. ar-Rum ayat 22), persatuan dan kesatuan (QS. Ali Imran ayat 103, dan QS. Al-Anbiya ayat 92, patriotisme (QS. At-Taubah ayat 41 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9), dan pembebasan (QS. An-Nisa ayat 75).

<sup>11</sup> Aspek-aspek yang tercakup pada sikap nasionalisme adalah; Kesetiaan dan cinta terhadap Negara, Kepedulian terhadap kesejahteraan Bersama, Partisipasi dalam kehidupan politik, patriotism dan pengabdian, penerimaan terhadap keragaman, memiliki komitmen terhadap pembangunan nasional, perlindungan terhadap kedaulatan dan keamanan, serta kritik yang bersifat konstruktif terhadap negara. Pada poin adanya kepedulian terhadap

tercantum dalam penafsiran Qs. At-taubah ayat 122 pada Tafsir al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi karya Bakri Syahid. Sejalan dengan itu, problem penelitian mampu dirumuskan sebagai berikut; *Pertama*, ayat yang oleh kalangan masyarakat dipahami bukan sebagai ayat yang menjelaskan konsep negara digunakan Bakri untuk menjelaskan konsep kenegaraan. *Kedua*, pembacaan Bakri terhadap ayat tersebut tentu mendapatkan pengaruh yang mengelilinginya, baik latar belakang penafsir ataupun kondisi sosial-politik pada masa penulisan tafsir. *Ketiga*, melalui pembacaan Bakri Syahid tersebut, peneliti akan menguraikannya dengan berpedoman terhadap definisi dan nilai-nilai nasionalisme serta pergeserannya. Problem-problem ini dijelaskan untuk memberikan ruang penelitian secara signifikan dengan berbagai penelitian yang ada sebelumnya.

Penjelasan sebelumnya memiliki daya tarik tersendiri sehingga penulis akan mengkaji nasionalisme dalam kitab Tafsir Al-Huda tepatnya pada Qs. At-taubah ayat 122, mengingat tafsir tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa daerah asal penulis, bahasa Jawa. Penggunaan bahasa tersebut mampu menunjukkan aspek lokalitas dan latar belakang mufasir dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an. Bukan hanya itu, latar belakang *mufasir* sebagai Letnan Jenderal yang memiliki kedekatan dengan penguasa mampu menunjukkan bagaimana sikap mufasir terhadap konsep kenegaraan -pemerintahan- pada masa tersebut. Dengan penjelasan mufasir tentang kenegaraan, maka kajian tersebut memiliki korelasi dengan tema yang peneliti angkat, yaitu nasionalisme.

## **PEMBAHASAN**

### **Nasionalisme dan Konteks Negara Indonesia Masa Rezim Orde Baru**

Istilah nasionalisme memiliki akar kata *nasionalism* dan *nation* jika merujuk pada bahasa Latin memiliki makna dasar saya lahir, saya dilahirkan.<sup>12</sup> Jika menilik pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah nasionalisme menjadi kata sakti untuk membangkitkan semangat juang terhadap penindasan kolonialis.<sup>13</sup> Korelasi makna nasionalisme dengan perjuangan untuk melawan kolonialisme saat itu berdampak terhadap terbatasnya makna nasionalisme pasca era kolonialisme. Pasalnya, jika istilah nasionalisme dianggap final dengan makna melawan penjajah, maka tidak akan ada lagi nilai-nilai nasionalisme pada jiwa generasi berikutnya, karena Indonesia telah mengakui dan diakui kemerdekaannya. Nasionalisme yang sebelumnya diartikan sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air sebagai simbol patriotisme heroik yang mampu menghalalkan segala cara demi kepentingan bangsa, sudah tidak relevan untuk masa pasca-kemerdekaan. Hal demikian mendorong cendekiawan mengembangkan makna yang berkaitan, bahwa nasionalisme telah mengalami pergeseran makna dengan cakupan yang lebih luas; adanya persamaan dari kelompok, etnis, budaya yang plural dan kebanggaan. Nasionalisme pasca kemerdekaan lebih menekankan terhadap identitas konkret, seperti negara modern, pemerintahan yang demokrasi, serta adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>14</sup>

---

kesejahteraan Bersama menjadi penafsiran Bakri terhadap Qs. At-taubah ayat 122.

<sup>12</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS, "Nasionalisme (Bahan Ajar Latsar Gol III Angkata Ke-37)," *Nasionalisme*, 2019.

<sup>13</sup> Anggraeni Kusumawardani and Buletin Psikologi, "Nasionalisme," *Archives de Médecine Sociale* 7, no. 1 (1951): 38–48.

<sup>14</sup> Kusumawardani and Psikologi.

Makna tersebut menjadi tema yang cukup mencolok pada masa rezim Orde Baru yaitu dasar negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila sebagai falsafah dasar negara, serta pembangunan ekonomi-politik sebagai fokus utama negara.<sup>15</sup> Adapun korelasi dengan agama, sejak pasca kemerdekaan Indonesia (Orde Lama) telah disepakati adanya Departemen Agama yang disiapkan khusus untuk melayani kelompok semua agama yang ada di Indonesia. Hal demikian dikembangkan pada masa Orde Baru dengan didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan MUI menjadi pusat kontrol kegiatan keagamaan Islam, sehingga mampu memastikan bahwa pandangan Islam yang diakui oleh pemerintah berbanding lurus dengan ideologi negara. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru terdapat pelibatan agama untuk mendukung kebijakan-kebijakan rezim.

### **Biografi Bakri Syahid**

Brigadir Jenderal Drs H. Bakri Syahid dengan sapaan akrab Bakri Syahid lahir di kp. Suronatan, Ngampilan, Yogyakarta pada 16 Desember 1918, bertepatan dengan hari pasaran Senin Wage<sup>16</sup> memiliki nama asli Bakri.<sup>17</sup> Nama yang menyertainya “Syahid” merupakan nama ayah-nya, Muhammad Syahid berasal dari Kotagede, Yogyakarta. Bakri lahir dari rahim ibu yang bernama Dzakirah berasal dari Ngampilan, yang kemudian menjadi tanah di mana ia dibesarkan.<sup>18</sup> Bakri dibesarkan pada lingkungan keluarga yang agamis berasal dari kalangan Muhammadiyah. Melalui organisasi inilah Bakri mengasah intelektual dan jenjang karirnya.

Bakri mengenyam pendidikan formalnya bermula pada Madrasah Muallimin yang dulu bernama *Kweekschool Islam Muhammadiyah* hingga pada tahun 1935. Lantas ia mendapatkan amanat dari organisasi untuk ikut serta berdakwah sebagai bentuk pengabdianya ke Bengkulu bersama kakak iparnya hingga pada tahun 1942.<sup>19</sup> Dengan pengalaman pengajarannya, ia melanjutkan menjadi Kepala Pusat Rawatan Rohani (Pusroh) Angkatan Darat di Jakarta, masa ini sebagai gerbang awal Bakri masuk pada dunia militer. Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan keislamannya ke IAIN Sunan Kalijaga pada 1957 di fakultas Syariah dan berhasil lulus pada tahun 1963. Karir militer ia mulai bangun sejak 1964, dimana pada tahun tersebut ia diminta Jenderal Ahmad Yani untuk studi bidang militer ke Fort Hamilton, New York, Amerika Serikat.<sup>20</sup>

Karir pendidikan dan kemiliteran ia dapatkan begitu cepat. Karir pendidikan mampu ia tunjukkan dengan menjadi pimpinan dua perguruan tinggi yang berbeda, yaitu IAIN Sunan Kalijaga (1972-1976) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai rektor pertama diperjuangkan bersama rekan-rekannya sejak tahun 1981.<sup>21</sup> Meskipun, proses pengangkatannya sebagai rektor IAIN Sunan Kalijaga mendapat ragam respon, diantaranya respon mahasiswa yang sebagian menolak adanya rektor dari kalangan militer, pengangkatan tetap dijalankan. Proses pelantikan mulanya dijadwalkan pada 15 Juli 1972 diundur menjadi 10 Agustus 1972.

---

<sup>15</sup> Howard M Fedespiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia Dari Mahmud Yuns Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan : Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1996); 63).

<sup>16</sup> Gabungan Hari secara nasional dengan hitungan hari Jawa yang mencakup; Legi, pon, Pahing, Wage, dan Kliwon.

<sup>17</sup> Penerbit, “Cacala Saking Penerbit,” in *Tafsir A-Huda : Tafsir Qur'an Basa Jawi*, 1977; 9.

<sup>18</sup> Imam Muchsin, *Tafsir Al-Qur'an Dan Budaya Lokal : Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

<sup>19</sup> Penerbit, “Cacala Saking Penerbit.”; 09.

<sup>20</sup> Penerbit, “Cacala Saking Penerbit.”; 09.

<sup>21</sup> Muchsin, *Tafsir Al-Qur'an dan Budaya Lokal : Studi nilai-nilai Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*: 44-46.

Sedangkan jabatan rektor pertama UMY ia dapatkan saat bekerja sama bersama kawannya; Mawardi dan Dasron untuk merintis mendirikan lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah tersebut.

Keberhasilan dalam karir militernya ditunjukkan dengan amanat yang diembannya, diantaranya sebagai Wartawan Perang No. 6-MBT, Komandan Kompi, Kepala Pendidikan Pusroh Islam Angkatan Darat, Kepala Staf Batalyon STM-Yogyakarta, Staf Sekretaris Negara RI, Wakil Kepala Pusroh Islam Angkatan Darat, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari fraksi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Ia tergabung sebagai anggota MPR RI tepat saat karyanya, Tafsir al-Huda pertama kali terbit (1977).<sup>22</sup> Walaupun baru diterbitkan, keberadaan kitab tafsir telah ada sejak 1972.<sup>23</sup> Bidang militer, kebangsaan yang digelutinya bukan menjadi penghalang ia untuk selalu berkarya, justru dengan ragam aktivitasnya ia memanfaatkan waktu luang untuk menulis. Demikian dibuktikan dengan ragam karya yang ia hasilkan. Adapun karya-karya yang dimaksud adalah; (1) Tata Negara RI, (2) Ilmu Jiwa Sosial, (3) Kitab Fikih, (4) Kitab Aqid, (5) Ilmu Kewira, (Pertahanan dan Keamanan Nasional, (6) Pertahanan dan Keamanan Nasional, (7) Ideologi Negara Pancasila Indonesia (8) Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi; yang dikaji pada artikel ini.

### **Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Huda**

Keberadaan Tafsir al-Huda beriringan dengan adanya Al-Qur'an dan Tafsirnya dari pemerintah yang terbit pada 1975 sebagai bentuk proyek persiapan pembangunan lima tahun negara pada bidang agama.<sup>24</sup> Syahid mulai menulis pada tahun 1970 dan selesai pada 1977. Johanna Pink menyebut bahwa Tafsir al-Huda menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahnya sebagai basis atau acuan penyusunannya.<sup>25</sup> Keberadaan yang beriringan tersebut terdapat kemungkinan adanya korelasi antara Tafsir al-Huda dengan Al-Qur'an dan Tafsirnya. Walaupun secara langsung tidak disebutkan sebagai proyek, namun tujuan adanya Tafsir al-Huda merupakan sebagai bentuk pembangunan kesadaran masyarakat untuk memahami kitab agama.

Secara eksistensi Tafsir al-Huda dianggap sebagai tafsir pertama yang disusun dengan penyalinan ayat Al-Qur'an dan penyertaan tafsir dengan huruf latin di Jawa.<sup>26</sup> Bakri Syahid menyebut pada bagian "Purwaka" bahwa penulisan Tafsir al-Huda dalam Bahasa Jawa merupakan wujud dari kesadaran yang ia rasakan dan keprihatinannya terhadap tidak adanya tafsir yang ditulis dalam Bahasa Jawa dengan huruf latin.<sup>27</sup> Padahal Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam seharusnya menjadi rujukan muslim dalam menjalani kehidupan. Bagi orang Jawa yang terbiasa dengan tulisan latin sangat membutuhkan adanya kitab tafsir berbahasa Jawa yang mudah dipahami.

Keprihatinannya tersebut juga terdorong oleh beberapa kalangan yang ia jumpai pada saat sarasehan bersama sejawatnya di Makkah, lebih tepatnya yang berada di kediaman Syekh Abdul Manan. Pada saat itu ia bertemu juga dengan jamaah haji berasal dari suku Jawa yang merantau ke berbagai mancanegara, seperti Suriname, Singapura, Muangthai, dan Filipina.

---

<sup>22</sup> (Penerbit PT Bagus: 1977)

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Yayasan Dana Bakti Wakaf Ull, 1991). dalam Abror, "Potret Kronologis Tafsir Indonesia."

<sup>24</sup> Abror, "Potret Kronologis Tafsir Indonesia."

<sup>25</sup> Pink, "Introduction."

<sup>26</sup> Umaiyatus Syarifah, "Kajian Tafsir Berbahasa Jawa : Introduksi Atas Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid A .," *Hermeneutik* 9, no. 2 (2015): 335–54.

<sup>27</sup> Bakri Syahid, "Purwaka," in *Tafsir A-Huda : Tafsir Qur'an Basa Jawi* (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1977): 7–9.



Sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka butuh adanya kitab tafsir dengan menggunakan Bahasa Jawa dan ditulis dengan huruf latin.<sup>28</sup> Keberadaan tafsir bahasa Jawa dengan tulisan latin diharapkan mampu dipahami muslim Jawa. Pemahaman Al-Qur'an menurut Bakri mampu dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini, Bakri menggunakan bahasa Jawa sebagai sarana pengungkapan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Pendekatan sebagai sarana untuk memahami Al-Qur'an mampu dilakukan dengan pengetahuan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu jiwa (saat ini disebut dengan psikologi), ilmu etnologi, sosiologi, geografi, demografi, ekologi, juga dengan ilmu eksakta. Pernyataannya disusul dengan pernyataan lain bahwa kesungguhan upaya kita dalam membangun bangsa dan wataknya (paradigma masyarakat pada suatu bangsa) itu tidak mudah, namun itu adalah sebagai kewajiban yang mulia.<sup>29</sup> Pernyataan-pernyataan yang secara tertulis disertakan Bakri pada pengantar karyanya menunjukkan bahwa tujuan penulisan kitab tafsir al-Huda yaitu ikut serta mengupayakan pembangunan negara melalui paradigma masyarakat bangsa dengan melalui teks-teks agama (ayat Al-Qur'an) sebagai penguatnya atau bahkan sumber gagasannya.

Pemaknaan Bakri Syahid terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa corak tafsirnya mengarah kepada corak *adabi-ijtimā'i*. Pendapat itu juga dikemukakan oleh Abdul Rahman yang menyebut bahwa terdapat tiga corak yang ada pada Tafsir al-Huda; *adabi ijtimā'i*, *fiqhī*, dan *'ilmī*, namun corak pertamalah yang paling dominan.<sup>30</sup> Oleh karena itu dapat dikategorikan bahwa Tafsir al-Huda termasuk kategori tafsir dengan corak *adabi ijtimā'i*. Umiyatus Syarifah menyuguhkan contoh penafsiran yang dilakukan Bakri Syahid yang bersinggungan erat dengan lingkungan sosial pada masa penulisan, dimana penafsiran lafadz munafik pada QS. Al-Baqarah; 22 sebagai orang yang sembrono. Begitu juga dengan penafsiran yang dilakukan Bakri dalam menjelaskan ayat tentang makanan dan minuman yang diharamkan, Bakri menyebut sabu-sabu sebagai salah satunya, demikian berkorelasi dengan pernyataan Miiitsou Nakamaru bahwa Yogyakarta menjadi salah satu konsumen terbesar sabu-sabu pada waktu itu.<sup>31</sup>

Pembahasan tentang isu-isu sosial masyarakat dalam upaya penafsiran ayat Al-Qur'an mampu mengantarkan Tafsir al-Huda mendapatkan respon positif di kalangan masyarakat. Hal itu selaras dengan percetakan yang dilakukan secara berulang-ulang (8 kali cetak) dengan jumlah 1000-2000 eksemplar pada masing-masing cetaknya. Tafsir yang dicetak disebarkan hingga mancanegara, termasuk negara Suriname. Proses penyetakan tafsir ini tidak lagi dilakukan semenjak Bakri Syahid wafat yang mengakibatkan berhentinya beroperasi percetakan Bagus Arafah.

### **Sistematika Penulisan**

Metode penulisan Tafsir al-Huda mengikuti *tartīb mushāfi* dan lengkap mencakup 114 surat dalam 30 juz. Pada bagian awal surat, disertakan ciri-ciri khusus, nama surat, nomor urut surat, jumlah ayat pada surat, serta kategori surat *makiyyah* atau *madaniyyah*. Penyajian penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat Al-Qur'an sejalan dengan tafsir-tafsir lain generasi kedua, dimana cara penafsiran dengan penyertaan ayat Al-Qur'an pada bagian kanan, terjemah Bahasa

<sup>28</sup> Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda : Tafsir Qur'an Basa Jawi* (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1987).

<sup>29</sup> (Syahid 1987; 8)

<sup>30</sup> Abdul Rahman Taufiq, "Studi Metode Dan Corak Tafsir Al-Huda, Tafsir Qur'an Basa Jawi Karya Brigjend (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta I*, no. 1 (2017): 90.

<sup>31</sup> Syarifah, "Kajian Tafsir Berbahasa Jawa : Introduksi Atas Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid A ."

Indonesia, dan catatan kaki yang disertakan pada terjemah sebagai bentuk tafsir yang disampaikan.<sup>32</sup> Sisi perbedaan dengan karya-karya tafsir generasi kedua ada pada penyertaan terjemahnya dengan bahasa Jawa krama. Catatan kaki sebagai bentuk penafsiran untuk mengungkap makna dan memperjelas maksudnya. Tidak jarang pada catatan kaki Bakri mencoba mengkorelasikannya dengan penjelasan ayat lain ataupun dengan naskah budaya (dalam hal ini masuk dalam kajian interteks dan intrateks).

Secara umum sistematika penulisan Tafsir al-Huda layaknya tafsir lain yang disusun secara *tartīb mushafī*, namun tafsir ini sangat singkat, dikemas satu jilid yang terdiri atas 1411 halaman dengan ukuran kertas A4. Pada karya tafsir disertakan sambutan Menteri Agama RI, surat pengesahan, purwaka (pembukaan, cacala saking penerbit/kata pengantar penerbit), kepustakaan (daftar isi), sambutan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Komponen-komponen tersebut disertakan secara berurutan sebelum penafsiran surat al-Fātihah. Setelah penafsiran sampai surat al-Nās, disertakan doa khatam Al-Qur'an. Pengetahuan tentang dasar ajaran Islam disertakan Bakri Syahid setelah do'a khatam Al-Qur'an, yang terdiri atas; bab I tentang kitab suci Al-Qur'an, bab II tentang rukun Islam, bab III tentang rukun Iman, Bab IV tentang Syafaat, bab V tentang al-Birru (kebecikan); kebaikan; dan diakhiri dengan bab VI tentang hayuning bawana, dalam Bahasa Indonesia mampu dipahami sebagai bab yang menjelaskan tentang keindahan dunia, keharmonisan dunia yang mencakup tentang kedamaian.

### **Sumber Penafsiran**

Upaya penfasiran Al-Qur'an yang dilakukan Bakri Syahid dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir sebelumnya dan referensi-referensi lain yang berkaitan. Jenis literasi yang dijadikan rujukan tidak dibatasi secara kaku. Ia merujuk pada literatur keagamaan maupun non-agama. Demikian ia sertakan pada bagian sumber rujukan secara rinci. Adapun sumber penafsiran yang penulis mencoba untuk mengklasifikasikannya menjadi tujuh klasifikasi; Kitab Tafsir (al-Mushaf al-Muyassar karya Abdul Jalil 'Isa, *Fī 'ilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb, Tafsir al-Marāghī, karya Ahma Musthafa al-Marāghī, Tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur'an al-Karīm karya Ibnu Katsir, An-Nur Tafsir al-Qur'an al-Madīd karya Prof. Dr. T. M. Hasbi Ashshiddiqy, Tafsir al-Furqān karya Ahmad Hassan, The Holy Quran karya A. Yusuf Ali), karya ulumul Qur'an dan yang menyertainya (Hikmah Qoeraniyah karya Ki Bagoes H. Hadikoesomo, Catetan Pribadi Kuliyah Tafsir Qur'an Bersama Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya), pemerintahan (Kata Terpilih dari Departemen Penerangan karya Presiden Soeharto, Mengamankan Sila Ketuhanan Jang Maha Esa pada Symposium IAIN Syarif Hidayatullah 1970, Ideologi Negara Pancasila karya Drs. H. Bakri Syahid, Dharma 45 disusun oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI), literatur yang menjelaskan tentang perwira (Ilmu Kewiraan karya Kolonel Drs. H. Bakri Syahid), literatur yang memiliki korelasi dengan budaya Jawa (Kawi-Jawa dan Baoesastra Indonesia-Djawi karya W.J.S. Poerdarminta, Kepercayaan Masyarakat Jawa karya Drs. Romelon, Kapoestakakan Djawa karya Prof. Dr. R. M. Ng, Patheisme en Monisme karya Zoetmulder S. J. Dr. P. J, De Heiligen van Java karya Rinkes, Kidoengan kanjeng Susuhunan Kalidjaga, Serat Wedha Tama K. G. P. A. A. Mangkunegara IV, Soerat Woelangreh Kanjeng Susuhunan Paku Buwono), literature bernuansa fikih (Tuntunan Shalat dari Muhammadiyah Majelis Tabligh 1943, Himpunan Do'a-Do'a dari Pusroh Islam Angkatan Darat 1967, Manasik Haji dan Do'a Ziarah Direktorat Jenderal Urusan Haji 1970, Kitab Iman dan Sembahyang Majelis

<sup>32</sup> Fedespiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia Dari Mahmud Yuns Hingga Quraish Shihab*.

Tarjih Pusat Pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta 1929, Kitab Falak dan Hisab karya K. R. Muhammad Wardan. Fiqh al-Da'wah karya M. Natsir, Tuntunan Iman dan Islam karya Prof. K.H. R. Muhammad A), ruang lingkup sosial-science (Menenal Pokok-pokok Antropologi dan Kebudayaan karya Drs. Mahjunir, Islamic Way of Life karya Sayyid Abdul A'la Maududi, , Panel Diskusi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta 1977, Encyclopedia of social Science, poerbotjaroko dan Tardjan Hadjidjaja, Pengantar Anthropologi karya Prof. Harsojo, Sedjarah dan Kebudajaan Islam karya Prof. Dr. A Sjalabilislam Integrasi Ilmu dan Kebudayaan karya Drs. Sidi Gazalba), dan tujuh belas macam karya Prof. Dr. H. A. Mukti Ali (dalam hal ini tidak disebutkan lebih lanjut pada karyanya).

Upaya yang ia lakukan dengan berpijak pada teks agama untuk menghindari dari penyimpangan penggunaan ayat sebagai landasan gagasan yang ia kemukakan sesuai kebutuhan. Sebagaimana hasil penelitian Nurul Huda Ma'arif menyebut bahwa terdapat ayat-ayat dengan karakter longgar ditarik paksa oleh penyusun untuk mendukung suatu gagasan di mana ia setuju dan ikut serta memperjuangkannya. Seperti dukungan untuk rezim penguasa (orde baru) tanpa memperhatikan konteks budaya di mana ayat tersebut diturunkan.<sup>33</sup> Keadaan demikian tentunya sesuai dengan latar belakang dia yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Pada tahun 1977 yang Bakri nyatakan sebagai tahun penyelesaian tafsir tersebut yang merupakan masa rezim Orde Baru. Pada masa rezim Orde Baru inilah terdapat berbagai perubahan terjadi secara signifikan. Bukan hanya itu pada masa ini berbagai cara dilakukan oleh penguasa agar rakyat mau tunduk dan mengikuti arahan yang diberikan.<sup>34</sup> Upaya yang dilakukan Bakri tentunya sesuai dengan pernyataan bahwa pesan Tuhan dalam hal ini ayat Al-Qur'an akan selalu dipahami berbanding lurus dengan realitas kondisi sosial yang berjalan sesuai dengan berjalannya - perkembangan- zaman.

Keadaan demikian juga berbanding lurus dengan pernyataan Fadhli Lukman yang mengklasifikasikan lintasan sejarah penulisan tafsir di Indonesia, dimana Tafsir al-Huda ada pada lintasan sejarah dengan konteks internal Indonesia dan lokalitas tafsir sebagai titik berat yang digunakan.<sup>35</sup> Namun, menurut hemat penulis bahwa upaya penafsiran Bakri Syahid tidak murni dilakukannya dengan memaksakan ayat-ayat sesuai dengan kepentingannya. Hal itu ditunjukkan dengan bagaimana Bakri merujuk kepada karya-karya klasik sebelumnya ataupun yang memiliki korelasi dengan penjelasan yang akan dimuatnya. Adapun sumber rujukan yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan pada paragraf sebelumnya.

### **Nasionalisme dalam Tafsir Al-Huda**

Nasionalisme dalam Tafsir al-Huda ditemukan secara tersirat yang ditulis oleh mufasir pada penafsirannya Qs. At-Taubah: 122 yang kemudian dikorelasikannya dengan Qs. An-Nisa 59. Melalui kedua ayat tersebut penulis berupaya menggali pemahaman bahwa sikap nasionalisme mampu dilakukan dengan ikut serta dalam pembangunan negara dan tertib pada kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah atau "*ulū al-Amr*". Lantas pada ayat kedua, mufasir menyebut kriteria-kriteria yang seharusnya menempel pada pemerintah sebagai pemangku kekuasaan pada negara. Berikut penjelasannya.

---

<sup>33</sup> Maarif, "Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid Dalam 'Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi.'"

<sup>34</sup> Hadi Wahyono Dwi and Kasuma Gayung, "Propaganda Orde Baru 1966-1980," *Verleden* 1, no. 1 (2012): 1–109.

<sup>35</sup> Fadhli Lukman, "Telaah Historiografi Tafsir Indonesia: Analisis Makna Konseptual Terminologi Tafsir Nusantara," *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 49–77.



## Pembangunan Negara

Pembangunan negara yang disertakan oleh Bakri Syahid dijelaskan ketika ia menafsirkan Qs. At-Taubah ayat 122 yang secara tertulis ia sertakan pada bagian catatan kaki bagian akhir terjemah ayat dalam bahasan Jawa:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا  
ع قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Lan tumrap wong-wong Mu'min ora prayoga kabeh budhal perang, yagene ora ana sing budhal saperangan saka dheweke, perlu pada nyinau 'ilmu mangerteni Agama, lan supaya dheweke banjur awesh pepeling marang kaume menawa wus padha bali menyang Kampunge. Muga-muga dheweke (kaum-kaume) padha gelem eling.

Berikut tafsir yang dimaksud dalam Bahasa Indonesia;

“Dan bagi orang Mu'min tidak semua dianjurkan berangkat untuk berperang, sebagian dari kita perlu ada yang belajar ilmu agama, agar mampu mengingatkan kepada umat ketika kembali ke kampung halaman. Semoga kita menjadi umat yang selalu ingat.”

Bakri menjelaskan ayat tersebut secara rinci, berbeda dengan ayat-ayat lain yang ia coba gali maknanya, adapun catatan kaki yang dimaksud sebagai bentuk penafsiran yang ia berikan, yaitu:

Dhawuhing ayat punika kados sampun cetha terang, serta tetela wonten ing 'alam Islam, bilih kabetahipun ummat kedah dipun pilah-pilah lan dipun bage-bage panggarapipun, kados dene departemen-departemen manawi wonte pamarentahan. Sadaya gatra (aspek) masyarakat kedah dipun cakup, kadosto aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek ideologi, aspek keamanan-pertahanan, lan aspek agama. Ngrembakaniipun kedah sarwa manunggal, integrase, koordinasi, sinkronisasi, sarta harmoni satunggal an sawenehipun. Panggarapiun program, lan wragad sarta ingkang kontrol nitipriksa kedah dipun musyawarahaken dening para ahli lan wakil-wakil rakyat, ingkang mangertosi kabetahaning Ummat. Dene kabetahaning ummat punika peprincenanipun kathah anget, boten wonten anggeraniipun, jalaran gumantung kaliyan ombak-umbuling kawontenan lan lampahing jaman, sarta kiprahing tehnolgi modern. Mugi kawuningana ing para sutrisna, bilih ilmu tehnologi-modern kalayan Islam boten memengsahan, malah sajatosipun sami bantu-binantu, lan sami dene ngisi satunggal ing sawenehipun. Inggih kabetahan ingkang kados makaten punika ingkang kawastanan fardlu kifayah (kuwajibaning ummat ingkag wajib katindakaken kanthi samurna, manawi dipun lirwakaken ageng sanget bebayaniipun lan ageng dosaniipun menggah Allah). Inggih makaten wau sampun mesthi ugi kemawon sagedipun tumindak samudayanipun, kedah dipun wonteni rerakitaning organisasi, inggih punika pamerintah saking pilihaning ummat ingkang tinata sae, rajin tur beres (clean government). Awit saking punika miturut piwucaling Allah S.W.T. wonten ing Surat An-Nisa' ayat 59, babagan falsafah dhedhasaring negara (pamarentah), kawilujenganin ummat, adeg lan lestantunipun kedah wonten ulil-amri ingkang saged mranata nyakup sadaya gatra (aspek) masyarakat ummat.<sup>36</sup>

Berikut tafsir yang dimaksud dalam Bahasa Indonesia.

“Perintah dari ayat ini sepertinya sudah sangat jelas, dan tampak terang dalam Islam, bahwa kebutuhan umat harus dibagi-bagi dan dibedakan tugasnya, seperti departemen-departemen

<sup>36</sup> Bakri Syahid, Tafsir Al-Huda : Tafsir Qur'an Basa Jawi (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1987): 358.

dalam pemerintahan. Semua aspek masyarakat harus dicakup, seperti aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek Ideologi, aspek pertahanan-keamanan, dan aspek agama. Pengembangannya harus menyatu, terintegrasi, terkoordinasi, tersinkronisasi, serta harmonis dalam satu kesatuan. Pengerjaan program, anggaran, serta pengawasan harus dimusyawarahkan oleh para ahli dan wakil-wakil rakyat, yang memahami kebutuhan umat. Karena kebutuhan umat itu rinciannya banyak sekali, tidak ada aturan tetap, karena tergantung pada perkembangan keadaan dan perjalanan zaman, serta kemajuan teknologi modern. Semoga para pembaca menyadari bahwa ilmu teknologi-modern dan Islam tidak bertentangan, justru sebenarnya saling membantu, dan saling mengisi dalam satu kesatuan. Kebutuhan seperti inilah yang disebut *farḍlu kifayah* (kewajiban umat yang wajib dilaksanakan dengan sempurna, jika diabaikan sangat besar bahayanya dan dosanya di hadapan Allah). Untuk dapat melaksanakan semuanya itu, harus ada organisasi yang terstruktur, yaitu Pemerintah pilihan umat yang teratur baik, rajin dan bersih (*clean government*). Oleh karena itu, menurut perintah Allah S.W.T. dalam Surat An-Nisa' ayat 59, tentang dasar filosofi negara (pemerintah), keselamatan umat, berdiri dan lestariannya harus ada *ulil-amri* yang mampu mengelola semua aspek masyarakat umat.”

Hakikatnya, ayat tersebut memberikan pengajaran bahwa kekuatan masyarakat hendaknya telah diklasifikasikan sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Kemudian Bakri mencontohkan dengan departemen-departemen yang ada pada sistem pemerintahan Indonesia, di mana semua aspek yang ada pada masyarakat niscaya mampu dirangkul, seperti adanya departemen yang fokus terhadap aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, ideologi, keamanan-pertahanan, agama. Upaya perwujudannya mampu dilakukan dengan adanya musyawarah yang kemudian saling bersatu, berintegritas, berkoordinasi, bersinkronisasi, yang demikian mampu dilakukan dalam persatuan. Keadaan yang dijelaskan mufasir pun telah dijalankan pada masa Orde Baru, yakni adanya menteri-menteri untuk fokus pada bidangnya masing-masing, pada masa tersebut telah ada 41 jajaran kabinet yang berdiri.<sup>37</sup>

Bukan hanya itu, pada penafsirannya Bakri juga menyebut istilah wakil rakyat, istilah tersebut digunakannya saat menjelaskan bahwa program-program yang diusung kabinet-kabinet perlu adanya kontrol dan perlu adanya musyawarah dengan para wakil rakyat, mengingat wakil rakyat inilah yang mengetahui secara rinci kebutuhan rakyat. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Bakri memiliki perhatian tersendiri terhadap kesejahteraan rakyat yang tentunya mampu dilakukan melalui program-program menteri atau kabinet yang benar-benar berdampak positif terhadap masyarakat. Menurut Bakri, sistem demikian mampu berjalan pada pemerintahan yang terbentuk dengan parameter pemilihan langsung oleh rakyat yang telah tersusun secara sistematis dan *clean government*. Bakri berusaha untuk menguatkan argumen yang ia kemukakan dengan kembali menegaskan bahwa falsafah dasar negara butuh adanya pemimpin yang ia sebut dengan istilah *uli al-amr*, pemimpin yang mampu mencakup, mengayomi semua aspek yang ada pada masyarakat. Pendapat Bakri tentang pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat menunjukkan bahwa Bakri setuju terhadap sistem negara demokrasi, bukan sekedar alih kekuasaan. Seperti penunjukan Presiden yang dilakukan oleh MPR layaknya gaya kepemimpinan

---

<sup>37</sup> Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Kabinet Pembangunan IV,” n.d., <https://setkab.go.id/kabinet-pembangunan-vi/>.

jenderal besar Soeharto.<sup>38</sup>

Kembali merujuk masa penyusunan kitab Tafsir al-Huda ada pada masa pemerintahan rezim Orde Baru (di bawah kepemimpinan Soeharto), dimana pada masa tersebut pemilihan presiden dilakukan oleh MPR melalui sidang umum,<sup>39</sup> bukan dipilih langsung oleh rakyat. Namun menurut Islah Gusmian, demokrasi yang dimaksud dalam Tafsir al-Huda merupakan demokrasi Pancasila yang tengah diusung oleh pemerintah Orde Baru. Argumen Gusmian merujuk terhadap penafsiran Bakri pada Qs. An-Nisa 83 terhadap kata *ulū al-amr*,<sup>40</sup> dimana konteks pembicaraan ayat tersebut menjelaskan keadaan orang munafik yang kerap kali menyebarkan berita hoax agar muslim waspada dalam menyikapi berita yang disebarkannya, khususnya terhadap aspek keamanan. Berbeda dengan Bakri yang berusaha menjelaskan kata tersebut dengan merujuk pada pendapat sahabat Nabi kemudian mengkontekstualisasikan penjelasannya terhadap pemerintahan Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila.<sup>41</sup> Dengan demikian pemerintahan memiliki respon yang cukup suportif dengan adanya tafsir tersebut, bahkan memberikan dana dalam penerbitannya untuk dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.<sup>42</sup>

Penyusunan kitab Tafsir al-Huda pada rezim Orde Baru serta keberadaan mufasir yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan mendorong adanya pengaruh terhadap penafsiran ayat yang ia tafsirkan. Menurut Gusmian, tafsir yang dihasilkan oleh Bakri termasuk dalam tafsir dengan perspektif tafsir gincu serta bungkam. Tafsir gincu ditunjukkan dengan penafsiran Qs. An-Nisa ayat 83, sedangkan tafsir bungkam mampu ditelisik pada QS. al-Maidah ayat 32 yang pada saat menjelaskan kemiliteran, penjelasan Bakri cenderung lebih abstrak, memang ia mencoba menjelaskan dalam konteks ke-Indonesia-an, namun lebih terhadap hegemoni rezim Orde Baru.<sup>43</sup> Sikap nasionalisme tampak dengan adanya dorongan terhadap masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia (potensi) yang ada pada dirinya. Proses peningkatan sumber daya manusia perlu dukungan-dukungan dari pemerintah dengan program-program yang mampu digaitnya. Penggaitan mampu dilakukan secara optimal jika telah dibentuk departemen-departemen yang spesifik dengan program kerja sesuai fokus departemen. Dari upaya tersebut masyarakat akan terbantu dalam upaya untuk meningkatkan potensi sehingga terwujud masyarakat madani yang ikut serta berperan dalam pembangunan negara dari berbagai aspek yang ada.

Upaya penafsiran yang dilakukan oleh Bakri terhadap ayat ini memiliki sedikit keselarasan dengan Tafsir al-Marāghi, al-Manār dan al-Furqan yang menjadi sumber penafsirannya dimana pada ayat tersebut menunjukkan hukum mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama.<sup>44</sup> Namun pada hukum jihad yang secara mutlak wajib pada Tafsir al-Manar tidak disertakan Rasyid.<sup>45</sup>

---

<sup>38</sup> Diana Fauzia, 2018: 108.

<sup>39</sup> Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (2018): 63–70.

<sup>40</sup> Berikut penafsiran Bakri terhadap lafadz *ulū al-Amr* pada tafsir al-Huda;

*Ing zaman Rasulullah s.a.w. inggih punika ara Sahabat lan para Winasis ing ilmu, zaman sapunika Ulil Amri punika Pemerintahan Cara Demokerasi, boten tebih kados tata negari ing Indonesia cara Demokerasi Pancasila naminipun.* pada Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*. 153.

<sup>41</sup> Islah Gusmian, 2019: 269

<sup>42</sup> Gusmian, 2019: 338-340

<sup>43</sup> Gusmian, 2019: 310

<sup>44</sup> Ahmad Musthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971).

<sup>45</sup> Ridha, 2005: 61

Upaya penyertaan konteks adanya departemen-departemen pada negara berdasar pada analisis penulis, tidak ditemukan pada literatur rujukan karya tafsir yang ia sertakan. Hal demikian menunjukkan adanya keberpihakan Bakri Syahid terhadap makna asli teks “kewajiban menuntut ilmu agama dan penerapannya”. Sedangkan pemaknaan ayat yang menunjukkan bahwa tidak wajib semua muslim untuk ikut serta jihad melalui peperangan, dikembangkan oleh Bakri. bahwa dimaksud “memperdalam ilmu agama dan penerapannya” ia kontekstualisasikan terhadap sistem negara pada masa rezim Orde Baru. Upaya tersebut didorong oleh jarak kedekatan yang dimilikinya dengan penguasa.

### **Pemerintah dalam Suatu Negara**

Penjelasan Bakri pada Qs. At-taubah ayat 122 ditutup dengan penjelasan terhadap pemegang kekuasaan -pemerintah- melalui lafadz *ulū al-amr*, yang mana ia menyebut akan dijelaskan pada Qs. An-Nisa ayat 59. Adapun penafsiran yang ia sertakan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
ع وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Tiyang ingkang ngasta Pemerintahan punika wajib iman ing Allah, iman dumateng Rasulullah s.a.w. sarta nindaaken sadaya tatanan lan aturan agami Islam, manawi boten, tangen lamun badhe saged damel adil-makmur materiil lan spiritual, karaharjan donya lan akherat. Bab punika cocok sanget kados ingkang kasebat ing “wulang reh” vasan dalem Ingkang Sinuhun Paku Buwono IV: “Lamun ana wong micareng ngelmi, tan mufakat ing patang perkara. aja sira age-age, anganggep nyatanipun, limbangen lan kang patang perkara rumuhun. Dalil, Hadits, lan Ijmak, Qiyase, papat iku salah siji, anaa kang mufakat”. Tagesipun ilmu pengetahuan utawi kawicaksanaan paprentahan punika kedah cocok, boten kenging nyimang, saking Dalil (Quraan), Hadist Rasulullah s.a.w., Ijmak lan Qiyas; Pramila kedah dipun teliti, sampun nilar angger-anggering Agama.<sup>46</sup>

Berikut tafsir dalam Bahasa Indonesia

“Orang yang menjalankan pemerintahan itu wajib beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah s.a.w. serta melaksanakan semua aturan dan ketentuan agama Islam. Jika tidak, sulit untuk bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran baik materiil maupun spiritual, kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini sangat sesuai seperti yang disebutkan dalam “Wulang Reh” karya Ingkang Sinuhun Paku Buwono IV: “Jika ada orang yang membicarakan ilmu, tetapi tidak sesuai dengan empat hal. Janganlah kamu cepat-cepat menganggapnya benar, timbanglah dengan empat hal itu terlebih dahulu. Dalil, Hadis, dan Ijmak, Qiyas, keempat hal itu salah satunya harus ada yang sesuai.” Artinya, ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan pemerintahan itu harus cocok, tidak boleh menyimpang, dari Dalil (Al-Qur'an), Hadis Rasulullah s.a.w., Ijmak, dan Qiyas. Oleh karena itu, harus diteliti, jangan sampai meninggalkan aturan-aturan Agama.”

Jika disandingkan dengan penafsirannya pada Qs. An-Nisa ayat 83, disebut Gusman sebagai bentuk dukungan Bakri terhadap demokrasi Pancasila, penafsiran ayat ini tidak menyebutnya. Pada penafsiran tersebut Bakri menjelaskan bahwa pemangku kekuasaan -Pemerintah- wajib (harus) dari individu yang beriman kepada Allah, Rasulullah, dan yang

<sup>46</sup> Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*.

menjalankan tatanan pemerintahan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika tidak mencapai kriteria tersebut, pemangku kekuasaan merupakan seseorang yang mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran secara material, spiritual, dan sejahtera dalam urusan dunia serta akhirat. Secara tekstual ia menyebutkan bahwa pemangku kekuasaan diutamakan bagi mereka yang beragama Islam. Selaras dengan pemaknaan yang bersifat kontekst ke-Indonesia-an dengan masyarakat yang plural, ia mengedepankan muslim untuk mendudukinya. Penafsiran tersebut menunjukkan adanya penafsiran kontekstual yang berpacu terhadap penafsirak tekstual. Penafsiran yang disampaikan Bakri selaras dengan tafsir rujukannya, yaitu penafsiran Sayyid Quthb yang menyebut bahwa makna lafadz *ulū al-amr* merupakan pemimpin yang berasal dari kalangan mu'min, Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>47</sup> Begitu juga dengan penafsiran al-Maraghi dengan penjelasan bahwa makna *ulū al-amr* bukan hanya pemerintah atau pemimpin negara, termasuk juga *hukamā* (orang bijak yang memiliki pengetahuan hukum dan mampu mengambil kebijakan), *'ulamā* (orang yang memiliki kualitas ilmu agama yang mendalam), *ruasā al-jund* (kepala kemiliteran), *sāir al-ruasā* (semua bentuk pemimpin), *al-zu'amā* (Kabinet Mentri). Hal yang menjadi landasan al-Maraghi menyertakan semua aspek pemaknaan yang merujuk terhadap kebutuhan manusia dan kebaikan, sehingga ketika mereka sepakat memutuskan suatu perkara, wajib untuk ditaati selama tidak berpaling dari perintah Allah dan rasul-Nya, mampu dipercaya, serta tidak ada unsur pemaksaan.<sup>48</sup>

Selaras dengan Abdullah Yusuf Ali, Bakri memaknai *ulū al-amr* dengan penjelasan mereka yang memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan, mereka memiliki wewenang dari Tuhan, sehingga ajaran agama Islam memerintahkan untuk patuh terhadapnya, karena jika tidak demikian maka tidak akan ada wujud ketertiban yang menjadi impian banyak kalangan.<sup>49</sup> Pesan yang disampaikan Bakri selaras dengan pesan Yusuf Ali, dimana *ulū al-amr* merupakan orang yang memiliki amanat dari Tuhan untuk mewujudkan kebaikan, yang disebut Yusuf Ali dengan istilah ketertiban dan disebut oleh Bakri dengan istilah adil-makmur materil dan spiritual. Sementara pada Tafsir al-Manar bahwa makna *ulū al-Amr* sangat beragam dengan riwayat-riwayat yang Rashid Ridha sertakan. Adapun kewajiban mengikutinya jika *ulū al-Amr* bersepakat dengan mempertimbangkan demi terwujudnya kebaikan, kebermanfaatannya.<sup>50</sup> Bukan hanya itu, peneliti mendapati bahwa pada penafsiran Qs. An-Nisa ayat 59 Rasyid Ridha menyebutkan contoh-contoh bidang yang menjadi pertimbangan adanya kebaikan, seperti bidang perdagangan, pabrik (industri), pertanian/perkebunan.<sup>51</sup> Hal demikian tentunya memiliki korelasi dengan penafsiran Bakri Syahid pada Qs. At-taubah yang mencoba menggiring penafsirannya pada konteks pemerintahan dengan disertai departemen-departemen sesuai pada bidangnya.<sup>52</sup> Dengan demikian Tafsir al-Manar memberikan dorongan pada dirinya untuk ikut menyertakan ada penafsirannya, walaupun pada konteks ayat yang berbeda.

Rujukan Tafsir al-Huda bukan hanya pada kitab tafsir, namun juga pada literatur budaya Jawa -suku asalnya-. Rujukan terhadap budaya Jawa ini ia sertakan pada penafsiran ayat (Qs.

<sup>47</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Šilā'il Qur'ān*, n.d.

<sup>48</sup> Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*: 244

<sup>49</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an Text, Translator, and Commentary*, n.d.: 198

<sup>50</sup> Ridha, 2005.152.

<sup>51</sup> Ridha, 2005,152.

<sup>52</sup> Syahid, 1971, 358.



An-Nisa ayat 59) dengan menggunakan *Soerat Woelangreh Kanjeng Susuhunan Paku Buwono* sebagai bentuk legitimasi atas definisi terhadap *ulū al-amr* yang ia berikan. Dimana pada *Soerat* tersebut disebut bahwa yang menjadi pemangku kekuasaan dalam mengambil kebijakan harus cocok dengan ajaran agama Islam, baik apa yang ada pada Al-Qur'an, hadis, Ijmak, maupun Qiyas. Dari penafsiran yang ia berikan mampu ditarik suatu nilai bahwa Bakri lebih mendukung adanya pemerintah dengan pemimpin yang beragama Islam, sehingga ketika mengambil suatu kebijakan tetap akan memperhatikan apa yang ada pada empat perkara (Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas).

Serat Wulangreh karya Pakubuwono IV digunakan Bakri Syahid sebagai bagian rujukannya dalam menafsirkan Al-Qur'an dianggap oleh kalangan masyarakat sekitar sebagai karya monumental, yang mana ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dipengaruhi oleh masyarakat Jawa. Walaupun sebagai produk budaya, menurut Muh Wasith, ajaran yang termuat di dalamnya memiliki titik singgung dengan nilai-nilai agama.<sup>53</sup> Motif inilah mendorong penulis untuk menganalogikan bahwa adanya titik singgung nilai agama dan budaya menjadi daya tarik Bakri Syahid menjadikan Serat Wulangreh sebagai bagian dari rujukan karya tafsirnya. Ajaran tersebut menjadi pra pemahaman yang dengan mudah mampu membantu mufassir memahami ajaran Jawa pada serat tersebut. Sehingga, serat tersebut menjadi acuan gagasannya.

## **SIMPULAN**

Kontekstualisasi penafsiran ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Bakri Syahid terhadap sistem negara Indonesia pada masa penulisan tafsir (rezim Orde Baru), Qs. At-Taubah:122 menjadi bukti keberpihakan kepada penguasa. Qs. At-Taubah :122 yang selama ini dipahami oleh sebagian kalangan mufassir sebagai ayat yang mengandung makna perintah menuntut ilmu agama serta jihad digunakan Bakri Syahid dalam menafsirkan ayat tersebut. Namun terdapat upaya pengembangan makna oleh Bakri Syahid untuk mengkontekstualisasikan terhadap keadaan Indonesia. Bahwa perlunya pembangunan negara yang mampu dilakukan jika dibentuknya departemen-departemen negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Urgensi keberadaan departemen sebagai bentuk optimalisasi yang mampu dilakukan negara terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga negara sesuai dengan konsen departemen, dimana departemen akan mengadakan program-program sesuai dengan konsennya. Adanya fokus pada aspek tertentu, tentu hasil dan dampak pada masyarakat akan cenderung lebih optimal dibandingkan dengan tidak adanya fokus.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan penelitian yang hanya fokus terhadap pembacaan Bakri Syahid terhadap Qs. At-taubah ayat 122 yang kemudian dikorelasikannya terhadap Qs. An-Nisa ayat 59. Dengan keterbatasan tersebut memberikan peluang untuk dilakukan penelitian-penelitian berikutnya dengan mengembangkannya atau melalui pembacaan yang berbeda atau berkaitan dengan nasionalisme, seperti pembacaan pada Qs. An-Nisa ayat 85 secara spesifik berbicara tentang *ulū al-amr* layaknya Qs. An-Nisa ayat 59. Atau bahkan berupaya mengkaji bagaimana aspek pluralisme yang sempat menjadi isu penting dalam berbangsa, khususnya di Indonesia. Dari pijakan tersebut tentu mampu dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan lain sehingga terdapat hasil temuan yang dinamis.

---

<sup>53</sup> Muhammad Wasith Achadi, "Nilai-Nilai Filosofis Religius Serat Wulangreh," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2019): 32–42.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal. "Potret Kronologis Tafsir Indonesia." *Essensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2002): 189–200.
- Achadi, Muhammad Wasith. "Nilai-Nilai Filosofis Religius Serat Wulangreh." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2019): 32–42.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an Text, Translator, and Commentary*, n.d.
- Almascaty, Himy Bakar. *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ash-Shieddiqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Awwaliyyah, Neny Muthiatul. "Studi Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Huda, Tafsir Qur'an Basa Jawa Karya Jend. Purn. Drs. H. Bakri Syahid Al-Yogjawy." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 1 (2021): 119–39. <https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.231>.
- Departemen Agama RI. *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Yayasan Dana Bakti Wakaf UII, 1991.
- Fauzia, Diana. *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*. Revisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan AIPI, 2018.
- Fedespiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia Dari Mahmud Yuns Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan : Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1996.
- Gusmian, Islah. *Tafsir Al-Qur'an Dan Kekuasaan Di Indonesia: Peneguhan, Kontestasi, Dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Yayasan Salwa Dewa, 2019.
- Hadi Wahyono Dwi, and Kasuma Gayung. "Propaganda Orde Baru 1966-1980." *Verleden* 1, no. 1 (2012): 1–109.
- Indarja. "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (2018): 63–70.
- Indonesia, Sekretaris Kabinet Republik. "Kabinet Pembangunan IV," n.d. <https://setkab.go.id/kabinet-pembangunan-vi/>.
- Kusumawardani, Anggraeni, and Buletin Psikologi. "Nasionalisme." *Archives de Médecine Sociale* 7, no. 1 (1951): 38–48.
- Lukman, Fadhli. "Telaah Historiografi Tafsir Indonesia: Analisis Makna Konseptual Terminologi Tafsir Nusantara." *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 49–77.
- Maarif, Nurul Huda. "Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid Dalam 'Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi.'" *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 2 (2021): 69–91. <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.64>.
- Maraghi, Ahmad Musthafa Al-. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Mubasirun. "Values of Tepo Seliro in Bakri Syahid's Tafsir Al-Hudā and Bisri Mustofa's Tafsir Al-Ibriz." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021): 351–76.
- Muchsin, Imam. *Tafsir Al-Qur'an Dan Budaya Lokal: : Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Muhammad, Irham Maulana. "NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF BAKRI SYAHID (KAJIAN AYAT-AYAT NASIONALISME DALAM AL-HUDA TAFSIR QUR'AN

- BASA JAWI).” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2020.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Penerbit. “Cacala Saking Penerbit.” In *Tafsir A-Huda : Tafsir Qur’an Basa Jawi*, 9, 1977.
- Pink, Johanna. “Introduction.” In *Qur’an Translation in Indonesia Scriptual Politics in a Multilingual State*. New York: Routledge, 2023.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS. “Nasionalisme (Bahan Ajar Latsar Gol III Angka Ke-37).” *Nasionalisme*, 2019.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi šilālil Qur’ān*, n.d.
- Ridha, Sayyid al-Imam Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim Al-Masyhur Bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Syahid, Bakri. “Purwaka.” In *Tafsir A-Huda : Tafsir Qur’an Basa Jawi*, 7–9. Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1977.
- . *Tafsir Al-Huda : Tafsir Qur’an Basa Jawi*. Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1987.
- Syarifah, Umayyatus. “Kajian Tafsir Berbahasa Jawa : Introduksi Atas Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid A .” *Hermeneutik* 9, no. 2 (2015): 335–54.
- Taufiq, Abdul Rahman. “Studi Metode Dan Corak Tafsir Al-Huda, Tafsir Qur’an Basa Jawi Karya Brigjend (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid.” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta* 1, no. 1 (2017): 90.
- Zaelani, Thoriq Fadli. “Konsep Pemerintahan Bakri Syahid Dalam Tafsir Al-Huda Tafsir Qur’an Basa Jawi.” *Living Islam*, 2022.